

PERMUKIMAN KAMPUNG NELAYAN ‘BLANAKAN’ KABUPATEN SUBANG DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI PERMUKIMANNYA

Udjianto Pawitro¹, Widji Indahingtyas², Bambang Subekti³

^{1,2,3}Jurusan Teknik Arsitektur – FTSP – Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung

Gedung 17 Lantai 1 Jalan PH Hasan Mustopha 23 Bandung 40124

E-mail : udjianto_pawitro@yahoo.com / udjianto@itenas.ac.id

Abstrak

Perkiraan BPS (2008), masyarakat kampung nelayan masih didominasi oleh masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan yang tergolong rendah. Kondisi sosial-ekonomi dari masyarakat kampung nelayan ini juga berpengaruh terhadap bentukan permukiman pada kampung nelayan yang didiaminya. Pola permukiman kampung nelayan pada umumnya belumlah tertata dengan baik, karena proses terbentuknya merupakan proses yang alamiah yang cenderung spontan serta sporadic. Secara fisik kondisi permukiman kampung nelayan, masih belum terawat dan terpelihara dengan baik, terutama dari segi pola permukiman, kondisi sarana-prasarana hingga kondisi penyehatan lingkungannya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin di permukiman kampung nelayan, pada pokoknya merupakan upaya yang bersifat multi-disiplin yang didalamnya meliputi bahasan: sosio-budaya, sosio-ekonomi dan sosio-ekologis dari warga masyarakatnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin di kampung nelayan ini, salah satunya adalah berupa kegiatan pemberdayaan dengan pendekatan ‘PRA’ (Participatory Research Action) guna meningkatkan dan memperbaiki kondisi lingkungan fisik permukimannya. Dalam penelitian ini dibahas dua sub-topik utama, yaitu: (a) kondisi permukiman kampung nelayan, dan (b) upaya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan / perbaikan kondisi lingkungan fisik permukiman kampung nelayan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis secara deskriptif dengan didukung kegiatan pra-penelitian berupa: (a) studi literature, (b) survey lapangan dan (c) pencarian data-data pendukung melalui web-searching. Sedang studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah: permukiman kampung nelayan di Blanakan Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat. Temuan dalam penelitian ini adalah penataan pada tingkat atau skala lingkungan permukiman kampung nelayan, kondisi fisik kampung nelayan perlu diupayakan untuk ditingkatkan penataan lingkungan fisik-ekologisnya. Pada kawasan permukiman yang padat penduduk serta padat hunian, maka kondisi dan kualitas dari : (a) jalan-jalan lingkungan skala permukiman, (b) saluran drainase air hujan, (c) penanganan sanitasi lingkungan berupa MCK (mandi-cuci-kakus), (d) penyediaan sumber air bersih bagi para masyarakat nelayan, dan (e) sarana pembuangan sampah – perlu untuk ditingkatkan dan diperbaiki. Sedangkan penataan pada tingkat atau skala bangunan rumah tinggal nelayan, kondisi fisik bangunan yang perlu diperbaiki adalah meliputi : (a) kondisi struktur – konstruksi dari bangunan rumah tinggal nelayan, (b) kondisi penggunaan bahan bangunan atau ‘the materials of the buildings’, (c) kondisi sanitasi pada rumah tinggal, terutama dalam penanganan kakus dan saluran pembuangan air kotor rumah tangga, dan (d) kondisi tata-udara dan tata-cahaya pada beberapa bangunan rumah tinggal nelayan dinilai masih rendah.

Kata kunci : permukiman kampung nelayan, pemberdayaan masyarakat miskin

1. PENDAHULUAN

Todaro (1999) mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan pada dasarnya juga merupakan wahana untuk peningkatan kesejahteraan seluruh warga masyarakat (improvement on community welfare) serta untuk perluasan kebebasan substantif pada anggota masyarakat (substantive freedom). Dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, kegiatan pembangunan juga ditujukan untuk mencegah dan mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat. Sedangkan tujuan kegiatan pembangunan untuk perluasan kebebasan substantif adalah guna mendapatkan kebebasan berpendapat secara politis dan guna mendapatkan kemandirian dalam aspek sosio-ekonomi. Dalam kegiatan pembangunan bahasan ekonomi pembangunan beserta konsep pendekatannya menjadi hal-hal penting yang dipelajari guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan terkait dengan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan kebebasan substantif anggota masyarakat, maka pada dasarnya kegiatan pembangunan tersebut mengisyaratkan bahwa tantangan pembangunan adalah meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat (to improve the community quality of life). Di negara-negara yang sedang berkembang termasuk pula negara-negara yang masih miskin,

masalah peningkatan dan perbaikan kualitas hidup masih belum diperhatikan dengan baik. Sedangkan trend atau arah perkembangan dalam kegiatan pembangunan di kawasan perkotaan adalah makin meningkatnya tuntutan masyarakat dalam hal kualitas hidup.

Permasalahan utama dalam terjadinya kemiskinan pada sebagian anggota masyarakat luas di negara-negara sedang berkembang diantaranya adalah : (a) rendahnya tingkat pendapatan atau penghasilan pada sebagian kelompok masyarakat, (b) rendahnya akses terhadap peluang-peluang kegiatan ekonomi dari anggota masyarakat, (c) sangat terbatasnya akses pada lembaga-lembaga keuangan yang ada dari sebagian anggota masyarakat, (d) rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan kerja yang dimiliki sebagian anggota masyarakat, (e) rendahnya kemampuan pemenuhan akan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan, serta (f) rendahnya produktifitas kerja dan sikap budaya yang kurang produktif dari sebagian anggota masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah membahas dua sub topik terkait dengan judul utama penelitian. Ke dua sub topik tujuan penelitian tersebut adalah: (a) bahasan kondisi dan pola dari permukiman kampung nelayan, dan (b) bahasan pemberdayaan masyarakat miskin terkait dengan kondisi permukiman nelayan. Dengan studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah: permukiman kampung nelayan di Kecamatan Blanakan kabupaten Subang propinsi Jawa Barat.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif secara topikal dan metode analisis deskriptif dengan studi kasus yang membahas dua sub topik utama penelitian. Ke dua sub topik bahasan utama penelitian ini adalah : (a) bahasan kondisi dan pola dari permukiman kampung nelayan, dan (b) bahasan pemberdayaan masyarakat miskin terkait dengan kondisi permukiman nelayan. Guna mendukung kegiatan analisis atau pem-bahasan maka dilakukan tahap-tahap persiapan penelitian yang meliputi: (a) kegiatan telaah kepustakaan (*literature review*) yang mengarah kepada tinjauan secara teoritik terkait dengan sub-topik bahasan pada penelitian, (b) kegiatan survey lapangan dengan cara pengambilan photo-photo skala kawasan permukiman, dan (c) kegiatan pencarian data sekunder dengan melakukan ‘*website searching*’ melalui internet.

3. KAJIAN TEORITIK (*TEORETICAL REVIEW*)

(a) Pola Permukiman Kampung Nelayan di Indonesia

Pola permukiman kampung nelayan pada umumnya yang ada di Indonesia, mempunyai pola bentuk yang beragam sesuai dengan kondisi geografis maupun kondisi lingkungan sekitar tapak atau site. Kondisi geografis dari lokasi permukiman masyarakat nelayan antara lain meliputi: kondisi letak atau kedudukan lokasi terhadap garis lintang dan bujur geografis, kondisi iklim (makro) dan cuaca (mikro atau setempat), kondisi kelerengan atau topografi dari tanah pada permukiman, kondisi sumber air atau hidrografi bagi keberlangsungan kehidupan permukiman, kondisi tata lingkungan landscape yang terdiri dari tata hijau (pohonan) dan kondisi sumber energi yang tersedia di sekitar tapak atau lingkungan permukiman (lihat: Chiara, 1979).

Bentukan secara fisik dari permukiman masyarakat nelayan yang ada pada umumnya dilatar-belakangi oleh proses tumbuh dan berkembangnya suatu permukiman. Proses tumbuh dan berkembangnya suatu permukiman masyarakat nelayan secara historis sebagian besar merupakan permukiman yang tumbuh secara alami, tumbuh secara spontan dan berkembang secara sporadik. Akibatnya pada sebagian besar permukiman masyarakat nelayan di Indonesia terlihat kurang tertata dengan baik, cenderung tidak teratur (sporadic) serta cenderung berkembang secara spontan atau alami. Karena letak dan lokasinya yang jauh dari kota-kota, kondisi permukiman masyarakat nelayan masih belum tersentuh oleh adanya kegiatan penataan kawasan yang baik (lihat: Doxiadis, 1967).

Bentuk fisik dari pola permukiman nelayan yang ada biasanya berbentuk : (a) pola memanjang (linier) sepanjang garis pantai, (b) pola berkelompok atau cluster dengan pusat kegiatan permukimannya, biasanya di sekitar muara sungai, (c) pola parallel yaitu pada permukiman yang sudah cenderung besar atau luas, (d) pola loop dan/atau curve linier terutama pada permukiman dengan kontur yang relative terjal, dan (e) pola-pola gabungan atau kombinasi dari pola-pola tersebut diatas pada permukiman nelayan yang sudah besar atau luas. (White, 1976). Bahasan terkait lingkungan fisik permukiman masyarakat nelayan, selain kondisi permukimannya, juga dibahas kelengkapan / ketersediaan sarana dan prasarana permukiman, kondisi perumahan atau rumah-rumah tempat tinggalnya dan kondisi penyehatan lingkungan di sekitar permukiman.

(b) Masyarakat Miskin Nelayan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Masalah penting utama dalam bidang ekonomi pembangunan terutama di negara - negara sedang berkembang antara lain adalah: (a) rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi hasil pembangunan secara nasional, (b) ketidak-merataan distribusi hasil-hasil pembangunan pada anggota masyarakatnya, (c) rendahnya penguasaan keterampilan kerja dan penguasaan ipteks, (d) rendahnya tingkat produktifitas sebagian anggota masyarakat serta belum terbentuknya budaya kerja yang baik, (e) rendahnya akses anggota masyarakat pada lembaga keuangan yang ada, hingga (f) adanya masalah kemiskinan pada sebagian kelompok masyarakat tertentu. Karena itu salah satu tujuan dari kajian ekonomi pembangunan adalah bagaimana kegiatan pembangunan ekonomi dapat turut mengentaskan masalah kemiskinan dalam masyarakat (Todaro, 1999).

Pengalaman sejarah pada tahun 1998 - 2003 dimana di Indonesia terjadi krisis ekonomi telah meningkatkan kembali jumlah penduduk miskin di Indonesia secara drastis. Pada tahun 1998 terdapat penduduk miskin dengan jumlah meningkat menjadi 49,5 juta jiwa atau sekitar 24,2 persen dari seluruh penduduk. Kelompok masyarakat yang mengalami kondisi kemiskinan akibat adanya krisis ekonomi tersebut antara lain : para petani gurem (kecil), masyarakat nelayan, buruh-buruh sektor pertanian-perkebunan, buruh-buruh sektor industri skala kecil dan menengah, buruh dan pekerja sektor informal, hingga pedagang skala rumahan dan pedagang kaki lima. Khusus untuk masyarakat nelayan kondisi krisis ekonomi ketika itu juga berdampak besar terhadap kehidupan mereka sehari-hari.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat nelayan serta kebijakan terkait pelestarian ekosistem kawasan pesisir dan kelautan semakin gencar dilakukan dan tak pernah absen diajukan dalam program pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan masyarakat nelayan dan terjadinya kerusakan ekosistem kawasan pesisir dan kelautan masih menjadi peristiwa keseharian di sepanjang 95,181 ribu kilometer garis pantai di Indonesia. Menurut pakar perikanan Sudirman Saad mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat empat juta kepala keluarga masyarakat pesisir yang bermukim di 8.090 Desa, ternyata 32 persen di antaranya hidup dengan pendapatan kurang dari Rp. 600.000 per bulan di tahun 2013 yang lalu.

4. DATA LAPANGAN / HASIL SURVEY

(a) Peta Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat



Gambar 01 :

(b) Peta Propinsi Jawa Barat, (b) Peta Kabupaten Subang dan (c) Peta Kecamatan Blanakan (Sumber : www.google.co.id)

(c) Photo-photo Kondisi Lingkungan Alam dan Kondisi Nelayan Kecamatan Blanakan - Subang



Photo 01 – Photo 02 – Photo 03 :

Photo 01 : (a) s/d (d) Kondisi Alam Pantai Blanakan, Photo 02 : (a) s/d (d) Kondisi Alam Pantai Blanakan, dan Photo 03 : (a) s/d (d) Kondisi Nelayan di Kecamatan Blanakan (Sumber: www.google.co.id)

5. ANALISIS / PEMBAHASAN

(a) Bahasan Kondisi Permukiman Kampung Nelayan di Kecamatan Blanakan - Subang

Pola penyebaran permukiman kampung nelayan ini berlangsung alamiah, spontan dan cenderung sporadik. Kapling-kapling yang terbentuk pada umumnya merupakan kapling dengan luasan sempit sekitar 45 meter persegi hingga 80 meter persegi. Sedangkan tingkat kepadatan bangunan terhadap luas lahan atau BCR diperkirakan antara 70% hingga 80%. Pada kapling rumah-rumah tempat tinggal nelayan ini sebagian besar dipergunakan untuk mendirikan bangunan, dan hanya tersisa sedikit yaitu sekitar 20% hingga 30% saja yang dipergunakan untuk halaman rumah. Kondisi kepadatan permukiman masyarakat nelayan ini cenderung padat atau sumpek.

Diperkirakan sekitar 2/3 dari seluruh perumahan kampung nelayan ini, kondisi rumah tempat tinggalnya belum mendapat perawatan dan pemeliharaan dengan baik. Dilihat dari kondisi struktur-konstruksi bangunan, perumahan kampung nelayan ini cenderung menggunakan struktur-konstruksi bangunan sederhana, dengan bentuk bangunan tradisional Sunda, dengan sebagian besar memiliki bentuk atap pelana. Bahan bangunan yang banyak digunakan pada bangunan rumah tempat tinggal nelayan adalah bangunan setengah bata, yang mempunyai makna bahwa pada bagian bawah menggunakan tembok batu bata, sedang pada bagian atasnya menggunakan dinding dari bilik bambu. Pada rumah tempat tinggal nelayan yang tergolong miskin, bahan bangunan utama yang digunakan adalah struktur-konstruksi kayu sederhana dengan bahan penyekat ruang dari bilik bambu.

Dari keseluruhan luas areal permukiman kampung nelayan di pantai Blanakan yaitu 8,3 hektar, kondisi permukimannya cenderung sporadik, tidak teratur dan kurang tertata dengan baik. Pada beberapa bagian permukiman, khususnya yang berdekatan dengan TPI (Tempat Pelelangan Ikan), kepadatan rumah-rumahnya cenderung sangat padat serta cenderung 'sumpek'. Dilihat dari tata letak masa bangunan rumah tinggalnya, tidak terdapat korelasi antara letak masa bangunan dengan orientasi matahari sebagai patokan atau acuan dalam membangun rumah. Demikian pula jika kita melihat secara lebih detail pada rumah-rumah nelayan di kawasan perumahan ini, masih minim tata cahaya dan tata udara pada bangunannya.

Akibat terbatasnya pendapatan dari pada umumnya para nelayan di kecamatan Blanakan ini, usaha perawatan dan pemeliharaan terhadap rumah tinggal yang ada dinilai masih sangat minim (terbatas). Selain terbatasnya jumlah dana yang dapat disisihkan untuk kegiatan perawatan dan pemeliharaan rumah tempat tinggal nelayan, sebagian besar dari masyarakat nelayan di kawasan ini masih mempunyai prioritas pembiayaan keluarga untuk kebutuhan dasar / primer. Dari jumlah penduduk di kawasan permukiman kampung nelayan ini, diperkirakan sekitar 20%-nya termasuk dalam kategori masyarakat 'sangat miskin'.

Melihat prioritas pembiayaan dalam keluarga, maka terlihat prioritas utama pembiayaan keluarga adalah untuk : Prioritas I – untuk memenuhi kebutuhan pangan / makan dan sandang sehari-hari, Prioritas II – untuk modal kerja sebagai nelayan yaitu: pemeliharaan perahu, pemeliharaan jaring dan pancing ikan serta bahan-bakar minyak untuk perahu, Prioritas III – untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan dari anggota keluarga. Sedangkan Prioritas IV – adalah untuk kebutuhan transportasi dari anggota keluarga nelayan serta kebutuhan sosial lainnya. Sedangkan Prioritas V – untuk kebutuhan perawatan dan pemeliharaan dari rumah tempat tinggalnya. Diperkirakan hanya sekitar 20% saja dari jumlah penduduk di kawasan permukiman nelayan ini yang dapat atau mampu untuk menyisihkan dana atau penghasilannya untuk keperluan 'tabungan' dana untukantisipasi kondisi darurat dalam keluarga.

Kondisi sarana dan prasarana di lingkungan permukiman kampung nelayan di pantai Blanakan ini dinilai masih terbatas dan belum memadai baik secara kuantita atau jumlah maupun secara kualitas atau mutu. Jenis sarana permukiman yang terdapat pada kawasan permukiman kampung nelayan ini adalah: (a) kantor RT / Kantor RW / kantor Balai Desa, (b) TPI (Tempat Pelelangan Ikan), (c) Sarana Peribadatan berupa bangunan Masjid Lingkungan, (d) Sarana Pendidikan berupa Sekolah Dasar (SD), (e) Tempat Tambat Perahu Nelayan – yang berada sepanjang bibir Pantai, dan (f) Sarana Kesehatan berupa Puskesmas Pembantu.

Melihat jenis prasarana dasar pendukung permukiman kampung nelayan, pada umumnya prasarana yang ada dinilai cukup memadai. Kondisi jalan-jalan lingkungan di sekitar permukiman nelayan terlihat pada beberapa tempat atau bagian masih kurang baik perawatannya. Demikian pula dengan kondisi saluran drainase pembuangan air hujan, pada beberapa lokasi masih sangat minim. Pada bagian dimaksud jika musim hujan tiba jalan lingkungan beserta sebagian permukimannya seringkali mengalami becek karena ada genangan air hujan yang tidak cepat tersalurkan. Sumber air bersih di lingkungan permukiman nelayan ini masih sangat terbatas, sebagian besar dari warga permukiman ini menggunakan air sumur untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.

Hal lain yang diamati di lapangan adalah kondisi MCK (Mandi-Cuci-Kakus) masih belum mendapat penanganan yang baik. Kakus yang terdapat di rumah tinggal nelayan sebagian menggunakan

teptic tank untuk mengumpulkan air kotor dan pembuangan tinja. Akibat masih belum baiknya penanganan MCK di kawasan permukiman nelayan ini, maka berdampak pula pada kondisi sanitasi dan penyehatan lingkungan secara keseluruhan di permukiman ini. Selain minimnya penanganan sanitasi lingkungan permukiman yang ada, juga kondisi penyehatan lingkungan seperti : drainase air hujan, pembuangan air kotor dan sanitasi rumah tinggal berupa kakus, maka pada sebagian dari kawasan pemukiman rawan terhadap terjangkitnya berbagai penyakit.

Upaya penataan pada skala rumah tinggal para nelayan yang ada bertujuan untuk meningkatkan kualitas kenyamanan dan meningkatkan mutu bangunan yang lebih sehat. Pertama, pada tingkat atau skala lingkungan permukiman kampung nelayan, kondisi fisik kampung nelayan perlu diupayakan untuk ditingkatkan penataan lingkungan fisik-ekologisnya. Pada kawasan permukiman yang padat penduduk serta padat hunian, maka kondisi dan kualitas dari : (a) jalan-jalan lingkungan sekitar permukiman, (b) saluran drainase untuk penyaluran air hujan, (c) penanganan sanitasi lingkungan terutama MCK (mandi-cuci-kakus), (d) penyediaan sumber air bersih bagi para warga masyarakat nelayan, dan (e) sarana pembuangan sampah tingkat lingkungan untuk ditingkatkan dan diperbaiki.

Kedua, pada skala bangunan rumah tinggal nelayan, kondisi fisik bangunan yang perlu diperbaiki adalah meliputi : (a) kondisi struktur – konstruksi dari bangunan rumah tinggal nelayan, terutama pada rumah-rumah yang kurang mendapat perawatan dengan baik, (b) kondisi penggunaan bahan bangunan atau 'the materials of the buildings', hal ini terkait dengan keawetan dan kesehatan dari bangunan, (c) kondisi sanitasi pada rumah tinggal, terutama dalam penanganan kakus dan pembuangan air kotor rumah tangga sehingga kondisi sanitasi rumah tinggal terutama kakus rumah dapat lebih sehat, dan (d) kondisi tata-udara (penghawaan) dan tata-cahaya yang merupakan bagian fisika bangunan dari rumah tinggal nelayan sehingga dapat lebih baik.

(b) Bahasan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Nelayan dan Peningkatan Kondisi Permukiman-nya Di Kecamatan Blanakan – Subang

Masalah kemiskinan yang menimpa sebagian dari kelompok masyarakat nelayan juga dialami oleh masyarakat nelayan di pantai kecamatan Blanakan kabupaten Subang Jawa Barat. Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan pada umumnya merupakan kemiskinan yang bersifat struktural dan kemiskinan yang bersifat kultural. Kondisi sosial dan kondisi lembaga ekonomi yang ada masih belum menjamin dan member kesempatan kepada sebagian anggota masyarakat nelayan untuk dapat bekerja secara berkelanjutan. Selain itu secara internal kondisi budaya sebagian anggota masyarakat nelayan masih kurang produktif dalam bekerja karena rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tingkat keterampilan kerja.

Badan Pusat Statistik (2008) dalam analisis perhitungannya memiliki data berbeda dari Bank dunia, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai jumlah 34,96 juta orang atau kisaran 15,42 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Garis angka kemiskinan yang dijadikan patokan adalah sebesar 1,55 dollar AS. Dan segian besar penduduk miskin di Indonesia diperkirakan sebesar 63,47 persen-nya berada di daerah pesisir dan pedesaan.

Pendekatan PRA (= *Participatory Research Actions*) yaitu suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan peran-serta anggota masyarakat yang dapat dipergunakan untuk menangani dan menanggulangi masalah kemiskinan pada kelompok masyarakat. Khusus dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dari permukiman kampung nelayan yang masih terbatas, pendekatan PRA ini dinilai cocok atau sesuai dengan kondisi yang ada, mengingat bentuk rencana dan bentuk program kegiatan mesti terlebih dahulu disosialisasikan kepada anggota masyarakat nelayan yang di-treatment. Apalagi jika program kegiatan pembangunan yang hendak direncanakan dan dilaksanakan menyangkut banyak kalangan atau meliputi masyarakat luas. (lihat: Hikmat, 1999).

Pendekatan PRA dalam kegiatan penataan lingkungan permukiman kampung nelayan pada pokoknya terbagi dalam dua kegiatan utama, yaitu: (a) kegiatan penataan pada skala kawasan permukiman, yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki pola bentuk fisik lingkungan permukiman, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman, serta meningkatkan / memperbaiki kondisi sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman kampung nelayan. (b) kegiatan penataan pada skala bangunan rumah tinggal dari para nelayan yang didalamnya meliputi aspek - aspek: struktur-konstruksi bangunan, aspek perbaikan bahan bangunan, dan aspek fisika bangunan (terkait dengan tata cahaya dan tata udara), sanitasi bangunan berupa kakus dan saluran pembuangan air kotor pada bangunan rumah tinggal nelayan.

6. KESIMPULAN

Masalah utama dalam bidang ekonomi pembangunan terutama di negara - negara sedang berkembang antara lain adalah: (a) rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi hasil pembangunan secara nasional, (b) ketidak-merataan distribusi hasil-hasil pembangunan pada anggota masyarakatnya, (c)

rendahnya penguasaan keterampilan kerja dan penguasaan ipteks, (d) rendahnya tingkat produktifitas sebagian anggota masyarakat serta belum terbentuknya budaya kerja yang baik, (e) rendahnya akses anggota masyarakat pada lembaga keuangan yang ada, hingga (f) adanya masalah kemiskinan pada sebagian kelompok masyarakat tertentu. Karena itu salah satu tujuan dari kajian ekonomi pembangunan adalah bagaimana pembangunan ekonomi dapat meringankan kemiskinan dalam masyarakat.

Pendekatan PRA (= *Participatory Research Actions*) yaitu suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan peran-serta anggota masyarakat yang dapat dipergunakan untuk menangani dan menanggulangi masalah kemiskinan pada kelompok masyarakat. Khusus dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dari permukiman kampung nelayan yang masih terbatas, pendekatan PRA ini dinilai cocok atau sesuai dengan kondisi yang ada, mengingat bentuk rencana dan bentuk program kegiatan mesti terlebih dahulu disosialisasikan kepada anggota masyarakat nelayan yang di-treatment. Apalagi jika program kegiatan pembangunan yang hendak direncanakan dan dilaksanakan menyangkut atau melibatkan banyak kalangan / masyarakat luas.

Kegiatan penataan dan peningkatan kualitas fisik dari lingkungan permukiman kampung nelayan ini dapat dilakukan antara lain dengan dua hal penting, yaitu: (a) penataan pada kawasan permukiman sebagai tempat berdirinya rumah-rumah tinggal dari para nelayan, dan (b) penataan pada bangunan rumah-rumah tinggal dari para nelayan. Upaya penataan pada skala lingkungan permukiman yang ada bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman menuju arah yang lebih baik dan lebih sehat. Sedangkan upaya penataan pada skala rumah tinggal para nelayan yang ada bertujuan untuk meningkatkan kualitas kenyamanan dan meningkatkan mutu bangunan yang lebih sehat.

Penataan pada tingkat atau skala lingkungan permukiman kampung nelayan, kondisi fisik kampung nelayan perlu diupayakan untuk ditingkatkan penataan lingkungan fisik-ekologisnya. Pada kawasan permukiman yang padat penduduk serta padat hunian, maka kondisi dan kualitas dari : (a) jalan-jalan lingkungan sekitar permukiman, (b) saluran drainase untuk penyaluran air hujan, (c) penanganan sanitasi lingkungan terutama MCK (mandi-cuci-kakus), (d) penyediaan sumber air bersih bagi para warga masyarakat nelayan, dan (e) sarana pembuangan sampah di tingkat lingkungan permukiman – perlu untuk ditingkatkan dan diperbaiki.

Penataan pada tingkat atau skala bangunan rumah tinggal nelayan, kondisi fisik bangunan yang perlu diperbaiki adalah meliputi : (a) kondisi struktur – konstruksi dari bangunan rumah tinggal nelayan, terutama pada rumah-rumah yang kurang mendapat perawatan dengan baik, (b) kondisi penggunaan bahan bangunan, hal ini terkait dengan keawetan dan kesehatan dari bangunan, (c) kondisi sanitasi pada rumah tinggal, terutama dalam penanganan kakus dan saluran pembuangan air kotor rumah tangga sehingga kondisi sanitasi rumah tinggal terutama kakus rumah dapat lebih sehat, dan (d) kondisi tata-udara (penghawaan) dan tata-cahaya yang merupakan aspek fisika bangunan dari bangunan rumah tinggal nelayan yang dinilai masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik RI, (2008) : *Indonesia Dalam Angka 2008*, BPS - RI, Jakarta.
- Chiara dan Cappleman, (1979) : *Site Planning Standard*, Van Nostrand - Reinhold, Co. Publisher, New York.
- Doxiadis, Constantinos A, (1967) : *EKISTICS: An Introduction to the Science of Human Settlements*, Oxford University Press, England.
- Hikmat, Harry, (1999) : *PRA : Participatory Research Action Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Kemenko Kesejahteraan Rakyat RI, (2014): *Program Nasional Peremberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*, Sekretariat TNP2K, Jakarta.
- Todaro, Michael P., (1999) : *Pembangunan Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga*, PT. Erlangga, Jakarta.
- White, Edward T., (1976) : *Site Planning*, MIT Press, Cambridge, USA.
- [Http://www.pantai-blanakan-subang](http://www.pantai-blanakan-subang).